

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2025



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Berdasarkan telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030, dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah "Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah" dan "Penanganan dan Pengembangan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan" LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan ii melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Selanjutnya pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 Sasaran Strategis, yaitu:

1. "Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan" dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah).
2. "Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan" dengan indikator penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (Juta Ton CO₂e).
3. "Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai).

Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis cukup berhasil memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan Pagu Anggaran Rp648.195.411.192,- dan realisasi Rp482.055.657.264 dengan rasio capaian sebesar 74,37 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur,



Ir. MOHAMAD SUBIYANTORO, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197806301997031001

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tiugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Aparatur	6
E. Aspek Strategis Rganisasi	7
F. Permasalahan Utama	10
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A. Perencanaan Strategis.....	24
B. Indikator Kinerja Utama	31
C. Perjanjian Kinerja.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan	37
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	38
C. Analisis Capaian kinerja	38
BAB IV PENUTUP	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Struktur Organisasi Dinas	6
Gambar I-2. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur	12

DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Sumber Daya Aparatur	7
Tabel I-2.	Data Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025	15
Tabel I-3.	Data Sebaran Hotspot Tahun 20219 s/d Tahun 2025.....	16
Tabel I-4.	Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi per- Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	17
Tabel I-5.	Data L Lahan Kritis menurut Tingkat Kekeritisan Lahan	18
Tabel I-6.	Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur	18
Tabel I-7.	Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial Berdasarkan KPHP/L Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2025	19
Tabel I-8.	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2025	20
Tabel II-1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2025-2029)	24
Tabel II-2.	Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program/kegiatan serta penyajian IKU.....	26
Tabel II-3.	Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran.....	27
Tabel II-4.	Indikator Kinerja Utama.....	32
Tabel II-5.	Perjanjian Kineja Tahun 2025 (Sasaran Srategis)	34
Tabel II-6.	Perjanjian Kineja Tahun 2025 (Program)	35
Tabel III-1.	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	36

Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP	36
Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kerja	38
Tabel III-4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025	44
Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	44
Tabel III-6. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RENSTRA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun 2024-2026	48
Tabel III-7. Effesiensi penggunaan sumber daya.....	66
Tabel III-8. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	72
Tabel III-9. Realisasi Anggaran Sesuai dengan perjanjian Kinerja.....	93
Tabel III-10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dalam struktur organisasi pemerintah di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta kedudukan Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

Berdasarkan ketentuan tersebut. Dinas Kehutanan digolongkan sebagai perangkat daerah Tipe A, yang dibentuk untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Khususnya Pasal 593, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Pasal 595, Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kehutanan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, kepala Dinas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan yang selaras dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutana;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, hambatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
6. Perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta ekosistemnya;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) serta rehabilitasi hutan dan lahan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaa, dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
10. Pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
11. Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
13. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 596, dalam melaksanakan fungsi tersebut Kepala Dinas Kehutanan mempunyai urusan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kebijakan pimpinan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Membina bawahan melalui rapat, pertemuan, dan bimbingan secara berkala untuk meningkatkan kinerja organisasi;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, hambatan, dan ketentuan yang berlaku;
5. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya guna menjamin tertib administrasi;
6. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kehutanan serta menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Merumuskan, merencanakan, membina, dan mengendalikan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan tata guna hutan, produksi dan pemanfaatan hutan, peredaran dan industri hasil hutan, serta perlindungan hasil hutan sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan kehutanan di kabupaten/kota untuk menilai tingkat pencapaian program dan kegiatan;
9. Melakukan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai bahan perbaikan kinerja;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai bahan perbaikan kinerja
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan kinerja antarunit organisasi yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta mekanisme koordinasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa setiap fungsi dilaksanakan secara efektif, efisien, terorganisir, dan akuntabel melalui garis komando dan tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Didukung oleh 1 (satu) Sekretaris serta 4 (empat) Bidang teknis. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuk 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2019

Adapun susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Dinas, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
- d. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
- e. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan yang mendukung penyelenggaraan urusan kehutanan terdiri atas :

- 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) sebanyak 17

(tujuh belas) unit, yaitu :

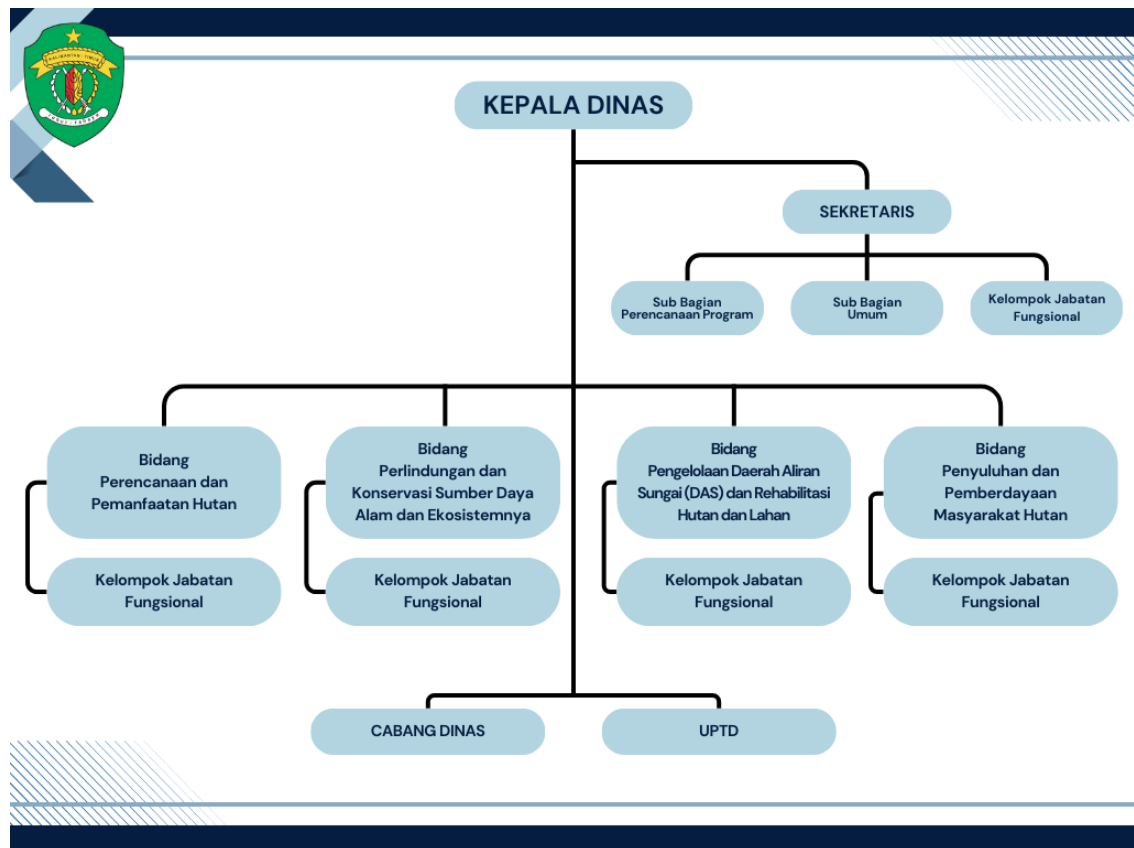
- UPTD KPHP Berau Barat;
- UPTD KPHP Berau Utara;
- UPTD KPHP Berau Tengah;
- UPTD KPHP Berau Pantai;
- UPTD KPHP Manubar;
- UPTD KPHP Bengalon;
- UPTD KPHP Kelinjau;
- UPTD KPHP DAS Belayan;
- UPTD KPHP Santan;
- UPTD KPHP Delta Mahakam;
- UPTD KPHP Batu Ayau;
- UPTD KPHP Damai;
- UPTD KPHP Mook Manor Bulatn;
- UPTD KPHP Meratus;
- UPTD KPHP Bongan;
- UPTD KPHP Telake;
- UPTD KPHP Kendilo.

2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 2 (dua) unit, yaitu:

- UPTD KPHL Balikpapan; dan
- UPTD KPHP Batu Rook

3) UPTD Taman Hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto

Berdasarkan susunan tersebut, hubungan kinerja antar unit organisasi dilaksanakan secara koordinatif, fungsional, dan hirarkis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana digambarkan dalam bagan struktur organisasi di bawah ini :



GAMBAR I-1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023

D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di Lingkup kerjanya, hingga akhir Desember 2025 didukung oleh 702 (tujuh ratus dua) orang aparatur. Rincian jumlah pegawai dimaksud disajikan pada Tabel 1.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, komposisi sumberdaya aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD menunjukkan kualitas yang relatif memadai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ditinjau dari tingkat pendidikan, yaitu 11,53% berpendidikan Pascasarjana, 49,28% berpendidikan

sarjana (S1), 8,83% pendidikan diploma, 29,77 % pendidikan SLTA, 0,14% pendidikan SLTP dan 0,42% pendidikan SD.

Tabel I-1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Di pl	SLTA	SL TP	SD
1.	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	18	16	3	23	8	-	4	19	3	8	-	-
3.	Bidang Perencanaan dan PH	25	5	4	22	4	-	4	20	-	6	-	-
4.	Bidang Perlindungan dan KSDAE	26	6	2	8	22	-	4	16	2	10	-	-
5.	Bidang PDAS dan RHL	12	7	5	12	2	-	7	7	-	5	-	-
6.	Bidang PPMH	15	6	2	17	2	-	4	14	-	3	-	-
7.	UPTD Tahura Bukit Soeharto	39	16	3	42	10	-	5	19	10	21	-	-
8.	UPTD KPHL Balikpapan	18	5	1	17	5	-	1	13	3	5	-	1
9.	UPTD KPHL Batu Rook	22	5	4	19	2	2	4	15	-	7	-	1
10.	UPTD KPHP Batu Ayau	16	8	2	18	4	-	4	10	4	6	-	-
11.	UPTD KPHP Bengalon	17	7	2	18	4	-	3	12	3	6	-	-
12.	UPTD KPHP Berau Barat	15	3	3	5	10	-	3	5	1	8	-	1
13.	UPTD KPHP Berau Pantai	14	3	2	9	6	-	2	6	2	7	-	-
14.	UPTD KPHP Berau Tengah	13	4	1	10	6	-	1	7	3	6	-	-
15.	UPTD KPHP Berau Utara	21	5	1	16	9	-	1	13	2	10	-	-
16.	UPTD KPHP Bongan	15	8	1	16	6	-	2	9	3	9	-	-
17.	UPTD KPHP Damai	23	8	4	20	7	-	6	10	3	12	-	-
18.	UPTD KPHP Delta Mahakam	29	10	4	21	13	1	5	17	1	15	1	-
19.	UPTD KPHP Kelinjau	18	11	2	22	5	-	4	17	2	6	-	-
20.	UPTD KPHP Kendilo	25	9	2	28	3	1	2	20	1	11	-	-
21.	UPTD KPHP Manubar	13	8	-	18	3	-	-	14	2	5	-	-
22.	UPTD KPHP Meratus	21	11	1	26	5	-	1	17	3	11	-	-
23.	UPTD KPHP Mook Manor Bulatn	26	6	2	24	6	-	4	16	5	7	-	-
24.	UPTD KPHP Santan	27	10	4	29	4	-	6	21	4	6	-	-
25.	UPTD KPHP Sub Das Belayan	22	8	-	22	8	-	-	17	2	11	-	-
26.	UPTD KPHP Telake	19	7	2	14	10	-	3	12	3	8	-	-
J U M L A H		510	192	58	476	164	4	81	346	62	209	1	3
JUMLAH PNS		702	702				702						

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi pembangunan kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai rencana tindakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan sumber daya, menentukan tahapan, fokus dan lokus intervensi, serta penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Strategi ini diarahkan untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan, meningkatnya luasan tutupan hutan, dan menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkelanjutan.

Aspek strategis utama pembangunan kehutanan difokuskan pada peningkatan pendapatan dari sektor kehutanan tanpa meningkatkan tekanan terhadap hutan alam. Pendekatan ini dilakukan dengan menggeser orientasi pengelolaan hutan dari eksploitasi berbasis volume kayu menuju pengelolaan hutan yang menekankan perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan hutan bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi kehutanan dapat berjalan seiring dengan peningkatan tutupan hutan dan penurunan emisi GRK. Dengan melihat aspek-aspek strategis sebagai berikut :

1. Aspek strategis pertama peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu melalui efisiensi pemanenan kayu dan hilirisasi industri perkayuan. Efisiensi pemanenan diarahkan kepada pengelola hutan, baik pemegang izin maupun pengelola hutan rakyat, agar pemanfaatan kayu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Hilirisasi industri perkayuan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk kehutanan melalui penguatan industri berbahan baku kayu. Dalam hal ini, Dinas Kehutanan berperan dalam mempermudah proses perizinan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mendorong praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.
2. Aspek strategis kedua adalah diversifikasi usaha kehutanan melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk penyimpanan dan penyerapan karbon. Diversifikasi usaha ini menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap kayu

sebagai sumber pendapatan utama, sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

3. Aspek strategis ketiga adalah peningkatan luas rehabilitasi hutan dan lahan, dengan prioritas pada daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga tata air dan daya dukung lingkungan. Rehabilitasi hutan dipandang sebagai upaya mendasar untuk memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi dan meningkatkan tutupan hutan secara berkelanjutan.
4. Aspek strategis keempat adalah pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari kontribusi Kalimantan Timur dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Penekanan laju deforestasi dan degradasi hutan menjadi kunci agar serapan emisi GRK dari sektor kehutanan dapat melampaui tingkat emisinya.
5. Aspek strategis kelima adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui penguatan perhutanan sosial. Dinas Kehutanan mendorong peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.

Seluruh aspek strategis tersebut dilaksanakan secara bertahap dan terukur dengan melibatkan para pemangku kepentingan, guna memastikan kesiapan dan dukungan dalam mencapai target-target strategis pembangunan kehutanan, termasuk target baru yang bersumber dari kebijakan nasional dan inisiatif daerah, dalam kurun waktu 2025–2029.

Penguatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kehutanan

Pencapaian tujuan kelestarian hutan yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas unsur penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan data dan informasi kehutanan, sistem pengawasan, serta akuntabilitas kinerja. Dinas Kehutanan berperan strategis dalam memperkuat penerapan SAKIP, digitalisasi data kehutanan, dan koordinasi lintas sektor.

Aspek ini menjadi strategis karena unsur penunjang yang kuat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Kinerja pembangunan sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari sisi produksi hasil hutan maupun kontribusinya terhadap pengendalian perubahan iklim. Namun demikian, perubahan tersebut juga mengindikasikan adanya permasalahan strategis yang perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, produksi hasil hutan kayu di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2018–2022 cenderung mengalami penurunan, khususnya produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Dalam kurun waktu lima tahun, produksi kayu bulat hutan alam menurun sekitar 50 persen, dari 1.341.256,27 m³ pada tahun 2018 menjadi 735.621,00 m³ pada tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada produksi kayu lapis, dari 437.710,03 m³ pada tahun 2018 menjadi 213.517,00 m³ pada tahun 2022.

Di sisi lain, produksi kayu bulat dari hutan tanaman relatif stabil dengan kisaran 3,15–3,48 juta m³ per tahun. Selain itu, terdapat capaian positif berupa peningkatan produksi hasil olahan kayu dalam bentuk veneer yang meningkat tajam, dari 9.543,36 m³ pada tahun 2018 menjadi 37.712,00 m³ pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pergeseran arah pengembangan sektor kehutanan dari orientasi produksi bahan mentah menuju peningkatan nilai tambah hasil hutan.

Selain aspek produksi, sektor kehutanan Kalimantan Timur juga mencatatkan kinerja positif dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam periode 2017–2023, emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Penurunan yang sangat tajam pada periode 2020–2021 diperkirakan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas pemanfaatan hutan dan kegiatan industri terkait. Capaian

ini memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan yang lebih terkendali mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam dan meningkatnya kinerja penurunan emisi GRK, maka pengelolaan sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi tepat apabila hanya berorientasi pada peningkatan produksi kayu bulat, khususnya dari hutan alam. Upaya peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman masih dimungkinkan, namun perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, bukan melalui perluasan areal tanam. Oleh karena itu, sektor kehutanan perlu didorong untuk bertransformasi melalui peningkatan nilai tambah hasil hutan serta diversifikasi usaha kehutanan di luar produk kayu.

Salah satu bentuk diversifikasi usaha kehutanan yang telah memberikan hasil nyata di Kalimantan Timur adalah pemanfaatan skema pembayaran berbasis kinerja penurunan emisi karbon melalui Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia. Melalui skema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh manfaat ekonomi atas keberhasilan pengurangan emisi GRK melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program/EK-JERP). Periode perhitungan kinerja skema FCPF-CF berlangsung dari Juni 2019 sampai dengan Desember 2024, sehingga pengurangan emisi setelah tahun 2024 memiliki potensi untuk ditawarkan melalui skema perdagangan karbon lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan kontribusi sektor kehutanan, ditetapkan dua isu strategis pembangunan sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

“1) Peningkatan nilai tambah produksi kayu dan diversifikasi usaha kehutanan selain kayu; 2) Pengembangan strategi dan implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan pasca FCPF-CF.”

Isu strategis tersebut dirumuskan berdasarkan analisis internal dan eksternal. Analisis internal menunjukkan bahwa meskipun produksi kayu bulat dari hutan

alam terus menurun, sebagian besar unit usaha kehutanan masih bergantung pada produksi kayu sebagai sumber pendapatan utama, sementara pemanfaatan potensi jasa lingkungan belum optimal. Diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, pembinaan, dan pengawasan untuk mendorong percepatan diversifikasi usaha kehutanan, antara lain melalui pemanfaatan jasa lingkungan seperti jasa air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Selain itu, peningkatan kontribusi sektor kehutanan juga perlu didukung melalui hilirisasi industri kehutanan dan inovasi peningkatan nilai tambah produk berbasis kayu hutan.

Secara umum, permasalahan strategis sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang masih dihadapi meliputi:

1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan

Pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengelola kawasan hutan melalui 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdiri atas 17 unit KPH Lindung serta 1 unit Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, termasuk pengelolaan dalam bentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh Universitas Mulawarman. Pengelolaan kawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pemerintahan daerah.

mengalami peningkatan. Kontribusi PNBPN kehutanan meningkat dari Rp1,12 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1,13 miliar pada tahun 2020, dan mencapai kontribusi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp1,17 miliar. Namun demikian, fluktuasi tersebut mencerminkan belum stabilnya kinerja pemanfaatan hutan, khususnya pada subsektor hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 4.104.271,21 m³ pada tahun 2021 menjadi 3.042.557,42 m³ hingga triwulan III tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh faktor alam berupa tingginya curah hujan yang menghambat aktivitas produksi, meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM dan biaya perawatan sarana produksi, serta kondisi pasar global yang lesu, khususnya menurunnya permintaan ekspor produk olahan kayu ke negara-negara Eropa. Di sisi lain, harga jual kayu bulat tidak mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menekan margin usaha. Meskipun demikian, produksi hasil hutan kayu diproyeksikan meningkat seiring penerapan ketentuan batas minimal realisasi produksi sebesar 50% oleh Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

Selain hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga mengalami penurunan dari 1.175,38 ton pada tahun 2021 menjadi 658,26 ton hingga triwulan III tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan HHBK, meskipun terdapat potensi peningkatan produksi pada akhir tahun seiring tanaman karet yang telah memasuki usia produktif.

Permasalahan strategis lainnya adalah belum tuntasnya penetapan dan tata batas kawasan hutan. Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2042, terdapat sekitar 553.811 hektar kawasan hutan yang masih berada dalam status usulan perubahan peruntukan (zona tunda), baik pada kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Kondisi ini menghambat

kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan, pelaksanaan tata batas, serta optimalisasi fungsi kawasan sesuai peruntukannya.

Secara keseluruhan, isu belum optimalnya pengelolaan hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, keterbatasan kewenangan daerah, fluktuasi kinerja pemanfaatan hutan, serta belum tuntasnya penetapan kawasan hutan. Kondisi tersebut menuntut penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan KPH, optimalisasi peran fasilitasi, serta sinergi lintas sektor guna mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Belum optimalnya Perlindungan hutan dan ekosistemnya

Perlindungan hutan dan ekosistem di Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari meningkatnya persentase kerusakan hutan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 persentase kerusakan hutan tercatat sebesar 0,12%, namun meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 17%, persentase kerusakan hutan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,16% dan persentase kerusakan hutan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,07% relatif rendah. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mendukung komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

**Tabel I-2. Data Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

No	Kab/Kota	Illegal Logging (Ha)	Perambahan (Ha)	Kebakaran (Ha)	Total
1	Berau	39,00	2.886,32	17,00	2.942,32
2	Kutai Timur	2,00	363,42	4,20	369,62
3	Bontang	-	23,70	-	23,70
4	Samarinda	-	-	-	0,00
5	Kutai Kartanegara	92,26	876,22	32,97	1.001,45
6	Balikpapan	-	-	0,01	0,01
7	PPU	-	47,20	-	47,20
8	Paser	152,71	0,50	-	153,21
9	Kutai Barat	21,00	618,00	-	639,00
10	Mahulu	-	55,39	-	55,39
Jumlah Total		306,97	4.870,75	54,18	5.231,90

Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan belum berjalan optimal, terutama pada wilayah yang jauh dari jangkauan operasional KPH serta kawasan penyangga di luar kawasan hutan. Upaya pencegahan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui patroli, sosialisasi, pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penyediaan sarana dan prasarana pengendalian karhutla. Namun capaian pencegahan masih rendah dan belum sebanding dengan luas kawasan hutan dan tingkat ancaman gangguan yang ada, terutama akibat keterbatasan jumlah dan kapasitas personel pengamanan hutan.

Tabel I-3. Data Sebaran Hotspot Tahun 2019 s/d Tahun 2025

Tahun	Titik Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur		
	Satuan	Titik Hotspot	Keterangan
2019	Lokasi	991	Satelit NOAA, SNPP, Terra / Aqua
2020	Lokasi	312	
2021	Lokasi	136	
2022	Lokasi	120	
2023	Lokasi	649	
2024	Lokasi	323	
2025	Lokasi	5.543	

Sumber : Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

Selain itu, terdapat kendala regulasi dan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Kalimantan Timur pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Penanganan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi juga belum menjadi prioritas, ditandai dengan keterbatasan pengawasan dan regulasi teknis yang memadai. Di sisi lain, pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) masih bersifat kolaboratif non-mengikat, sehingga koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan belum optimal. Kondisi tersebut secara keseluruhan menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan hutan dan ekosistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

3. Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Timur belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya dalam upaya penurunan luas lahan kritis. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Nomor SK.49 / PDASRH / PPPDAS /DAS.0 / 12 / 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Kalimantan Timur dalam tiga tahun terakhir tetap sebesar 274.477 hektar. Rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan setiap tahun, untuk tahun 2025 luas lahan kritis yang di Rehabilitasi untuk P0 seluas 1.881

Ha yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, Dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel I-4. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALIMANTAN TIMUR	Berau	283 Ha
2.		Kutai Timur	253 Ha
3.		Kukar	540 Ha
4.		Kubar	240 Ha
5.		Mahakam Ulu	99 Ha
6.		Bontang	-
7.		Balikpapan	10 Ha
8.		PPU dan Paser	40 Ha
9.		Samarinda	326 Ha
JUMLAH			1.881 Ha

Berkurangnya luas lahan kritis mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan sudah sangat tinggi, sehingga mampu memulihkan fungsi DAS secara efektif. Dimana capaian rehabilitasi lahan kritis menunjukkan peningkatan dari 344 Ha pada tahun 2022 menjadi 63 hektar pada tahun 2023, untuk tahun 2024 tidak ada kegiatan rehabilitasi untuk P0 tetapi kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan (P1 dan P2) dan pada tahun 2025 terjadi peningkatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan P0 seluas 1.881 Ha, kondisi tersebut menunjukan pengelolaan kegiatan terarah, efektif dan berkelanjutan, upaya ini memberikan dampak nyata terhadap penurunan lahan kritis dan oengingkatan fungsi DAS. Berikut data lahan kritis menurut tingkat kritisn lahan sesuai SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

Tabel I-5. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kalimantan Timur	7.271.198,41	272.450,31	3.512.659,59	1.196,30	3.618.279,64	12.675.784,59
Total						12.675.784,59

Sumber: SK MenLHK No. SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022

4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat hutan

Pemberdayaan masyarakat hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal. Hingga saat ini, luas areal Perhutanan Sosial mencapai 330.184,61 hektar dengan 179 Surat Keputusan persetujuan pengelolaan. Dari luasan tersebut, telah terbentuk 266 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang terdiri atas 119 KUPS kategori Blue, 120 KUPS kategori Silver, 25 KUPS kategori Gold, dan 2 KUPS kategori Platinum. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar KUPS, yaitu 237 kelompok, masih berada pada kategori Blue dan Silver yang mencerminkan belum berkembangnya usaha produktif dan belum terbangunnya kemandirian ekonomi kelompok. Berikut lokasi sebaran indikatif areal perhutanan sosial berdasarkan fungsi (Revisi X) tahun 2025

Tabel I-6. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Lokasi Kabupaten / Kota	Luas Berdasarkan Fungsi				Luas Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Berau	11.023	4.167	13	1.436	16.640
2	Kota Bontang			56		56
3	Kota Samarinda		48			48
4	Kutai Barat	102	73		324	498
5	Kutai Kartanegara	10.757	7.107	778	253	18.895
6	Kutai Timur	2.702	3.788	155	8	6.653
7	Mahakam Ulu		2		4.704	4.706
8	Paser	7.071	587	310	11.902	19.869
9	Penajam Paser Utara		77			77
GRAND TOTAL		31.655	15.850	1.312	18.627	67.443

Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11831 Tahun 2025 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (Revisi X)

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persetujuan Perhutanan Sosial belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan implementasi pasca persetujuan, khususnya dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, KUPS yang masih berada pada kategori Blue dan Silver memerlukan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, baik dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, maupun pengembangan jejaring pemasaran.

Tabel I-7. Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial Berdasarkan KPHP/L Provinsi Kalimantan Timur S/D Tahun 2025

NO	KPHP/L	Jumlah					LUAS (HA)					TOTAL PER-KPHP/L	
		HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1	KPHL Balikpapan	-	12	-	-	-	-	2.059,48	-	-	-	12	2.059,48
2	KPHL Batu Rook	2	-	-	-	-	2.438,19	-	-	-	-	2	2.438,19
3	KPHP Damai	12	1	3	1	1	28.702,38	500,00	989,00	96,00	48,85	18	30.336,23
4	KPHP Bengalon	5	4	-	1	-	24.303,55	3.937,00	-	109,00	-	10	28.349,55
5	KPHP Kelinjau	2	1	9	-	-	5.334,20	87,00	7.331,48	-	-	12	12.752,68
6	KPHP Batu Ayau	5	-	-	-	-	26.119,00	-	-	-	-	5	26.119,00
7	KPHP Mook Manor Bulatn	9	-	-	-	-	13.937,00	-	-	-	-	9	13.937,00
8	KPHP Berau Tengah	2	1	1	-	-	16.542,00	28,00	1.096,00	-	-	4	17.666,00
9	KPHP Berau Barat	10	4	-	3	-	52.133,00	744,21	-	424,89	-	17	53.302,10
10	KPHP Berau Pantai	5	-	-	-	-	22.065,00	-	-	-	-	5	22.065,00
11	KPHP Berau Utara	3	3	-	-	-	12.893,00	629,00	-	-	-	6	13.522,00
12	KPHP Sub Das Belayan	19	-	-	-	-	66.177,00	-	-	-	-	19	66.177,00
13	KPHP Telake	4	-	-	-	1	4.087,00	-	-	-	7.722,00	5	11.809,00
14	KPHP Delta Mahakam	2	27	-	-	-	1.338,00	8.266,30	-	-	-	29	9.604,30
15	KPHP Santan	5	11	1	-	-	1.586,00	1.258,00	3.225,00	-	-	17	6.069,00
16	KPHP Meratus	-	1	4	-	-	-	298,00	3.574,00	-	-	5	3.872,00
17	KPHP Bongan	1	1	-	-	-	5.000,00	1.605,00	-	-	-	2	6.605,00
18	KPHP Kendilo	3	5	-	-	-	8.571,00	951,46	-	-	-	8	9.522,46
19	KPHP Manubar	1	1	-	-	-	1.771,00	375,00	-	-	-	2	2.146,00
JUMLAH TOTAL KALTIM		90	72	18	5	2	292.997,32	20.738,45	16.215,48	629,89	7.770,85	187,00	338.351,99

Sumber : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, Rekapitulasi Perkembangan perhutanan sosial Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur s.d 2025

Namun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait jumlah dan kualitas tenaga pendamping serta penyuluh kehutanan yang belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah KUPS yang harus didampingi. Selain itu, implementasi Perhutanan Sosial pasca persetujuan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kerangka pengembangan wilayah yang komprehensif. Oleh karena itu, pengembangan Wilayah Terpadu (Integrated Area Development) berbasis Perhutanan Sosial menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, sehingga Perhutanan Sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai penunjang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai menjadi faktor penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan, sarana dan prasarana tersebut berperan dalam mendukung kelancara kegiatan perencanaan, pelaksanaan teknis, pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang kehutanan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut :

Tabel I-8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2025

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah Persil	63	M ²
2	Alat Besar Darat	74	Unit
3	Alat Besar Apung	59	Unit
4	Alat Bantu	1636	Unit
5	Alat Angkutan Darat Bermotor	964	Unit
6	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	Unit
7	Alat Angkutan Apung Bermotor	35	Unit
8	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	12	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
9	Alat Bengkel Bermesin	147	Unit
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	2868	Unit
11	Alat Ukur	498	Unit
12	Alat Pengolahan	254	Unit
13	Alat Kantor	2372	Unit
14	Alat Rumah Tangga	6510	Unit
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1114	Unit
16	Alat Studio	1228	Unit
17	Alat Komunikasi	708	Unit
18	Peralatan Pemancar	117	Unit
19	Peralatan Komunikasi Navigasi	1	Unit
20	Alat Kedokteran	46	Unit
21	Alat Kesehatan Umum	6	Unit
22	Unit Alat Laboratorium	555	Unit
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	Unit
24	Alat Peraga Praktek Sekolah	76	Unit
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8	Unit
26	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	24	Unit
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6	Unit
28	Senjata Api	13	Unit
29	Persenjataan Non Senjata Api	2	Unit
30	Alat Khusus Kepolisian	74	Unit
31	Komputer Unit	1971	Unit
32	Peralatan Komputer	1400	Unit
33	Alat Eksplorasi Topografi	11	Unit
34	Sumur	5	Unit
35	Produksi	1	Unit
36	Pengolahan Dan Pemurnian	12	Unit
37	Alat Pelindung	52	Unit
38	Alat Sar	275	Unit
39	Alat Kerja Penerbangan	25	Unit
40	Unit Peralatan Proses/Produksi	7	Unit
41	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6	Unit
42	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1	Unit
43	Peralatan Olah Raga	14	Unit
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja	469	Unit/M ²
45	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	57	Unit/M ²
46	Tugu/Tanda Batas	32	Unit
47	Jalan	30	Unit
48	Jembatan	5	Unit
49	Bangunan Air Irigasi	22	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
50	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	7	Unit
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7	Unit
52	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2	Unit
53	Bangunan Air Kotor	1	Unit
54	Instalasi Air Bersih / Air Baku	8	Unit
55	Instalasi Pembangkit Listrik	20	Unit
56	Instalasi Gardu Listrik	9	Unit
57	Jaringan Listrik	14	Unit
58	Jaringan Telepon	1	Unit
59	Bahan Perpustakaan Tercetak	1074	Unit
60	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	126	Unit
61	Barang Bercorak Kesenian	1	Unit
62	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22	Unit
63	Aset Tidak Berwujud	18	Unit
64	Aset Lain-Lain	892	Unit

Sumber: Data SIP BMD 2025

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

Penetapan tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, instruksi tersebut memberikan ketentuan bahwa tujuan perangkat daerah harus mengacu pada sasaran RPJMD, dirumuskan dalam bentuk kondisi yang ingin dicapai, bersifat terukur, serta ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun, berdasarkan arahan tersebut, tujuan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1.1 Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor dengan indikator Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kehutanan (%)
- 1.2 Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dengan indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (%)
- 1.3 Mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai).

2. Sasaran

Sasaran adalah kondisi yang menggambarkan tercapaiannya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau dari pencapaian program perangkat daerah (outcome), adapun sasaran renstra dinas kehutanan provinsi kalimantan timur adalah :

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan dengan Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (triliun rupiah)
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dengan indikator Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton CO₂e)
3. Terwujudnya Birokrasi Dinas yang akuntabel dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Dinas Kehutanan.

Tabel II-1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2025-2026)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Tujuan1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi SubSektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (triliun rupiah)
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (%)	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton CO ₂ e)
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Birokrasi Dinas yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Dinas Kehutanan

3. Anggaran

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 648.169.851.192,00 Pada Tahun 2025.

4. Program

Program pada dinas kehutanan provinsi Kalimantan Timur merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan dan strategi perangkat daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaeen Rencana Strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Program dirancang berorientasi pada hasil (outcome) yang terukur dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kontribusi subsektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, serta penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehtanan dan penggunaan lahan. Program juga memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga capaian kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja sasaran dan menjadi dasar pengendalian, mantauan, evaluasi serta penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Program yang dilaksanakan pada periode 2025-2029 bersumber dari APBD Provinsi KALimantan Timur, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Dana Reboisasi (DBH SDA-DR) derta dana *forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)* yang meliputi :

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel II-2. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan diversifikasi ekonomi SubSektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutanan			%	0,72	0,84	0,88
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,86	4,89	4,92
Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (%)			%	23,32	24,40	25,49

		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	(juta ton CO2e)	1,59	1,65	1,74
Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah			Indeks	85	85,5	87,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai AKIP	BB (76,40)	BB (77,00)	BB (77,50)
		Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	85,5	87
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,40	77,00	77,50

Tabel II-3. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 3. Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1. Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi 2. Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi 3. Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
2	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	Penurunan emisi GRK sektor kehutanan dari Business as Usual (Bau)	Juta Ton CO2e	Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH 4. Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor
						Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 4. Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan 4. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal
						Perbenihan Tanaman Hutan	1. Sertifikasi Sumber Benih 2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 3. Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan 4. Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 2. Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi 3. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
						Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
						Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 2. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 3. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KEGIATN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kewenangan Daerah Provinsi
					Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan 3. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan 5. Penyiapan Perhutanan Sosial
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 2. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 4. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KEGIATN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KEGIATN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan Mebel	1. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan capaian kinerja organisasi secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. **Menyediakan informasi kinerja yang relevan dan strategis** sebagai dasar dalam pelaksanaan manajemen kinerja yang efektif dan berkelanjutan.
2. **Menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi** yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan kinerja, serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3. **Menyelaraskan arah dan langkah kerja seluruh unit organisasi** agar sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta memastikan setiap

kegiatan dan keputusan yang diambil berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Tabel II-4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Target 2025	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,895	$\text{Produksi Hasil hutan Kayu} \times \text{Harga Kayu Berlaku}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Kehutanan
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta ton CO ₂ e	1,65	Baseline emisi – Emisi GRK (LUt)	Dinas Kehutanan	Kepala Dinas Kehutanan
3	Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,50	Nilai IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Dinas Kehutanan	Kepala Dinas Kehutanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77,00	Penilaian AKIP : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 5. Capaian Akuntabilitas Kinerja	Inspektorat Prov, Kaltim	Kepala Dinas Kehutanan

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sasaran Strategis)

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,895
2.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	Juta ton CO2e	1,65
3.	Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,50
	Terwujudnya Birokrasi Dinas yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77,00

Tabel II-6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Program)

Program	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Alokasi Anggaran
Pengelolaan Hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu	4.450.000	M3/Tahun	198.962.347.543
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	900	Ton	
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47	%	
	Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1	%	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Hutan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	730.007,98	Hektar	11.530.012.972
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	20.000	Ha	75.868.515.469
	Jumlah Kelompok usaha masyarakat yang ditetapkan kapasitasnya	20	Kelompok	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Das dan Sub Das yang dikelola	196.336	Hektar	3.985.318.570
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83	Indeks	255.317.606.614
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

Tabel III-1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30 %	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30 %	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	18,50
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20 %	-
Nilai Hasil Evaluasi			76,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1.	Mendorong penetapan target kinerja yang lebih strategis dan menantang, serta melakukan analisi atas indikator kinerja yang belum tercapai untuk menyusun strategi pencapaiannya	Sudah ditindaklanjuti dengan mendorong penetapan target kinerja yang lebih strategis dan menantang pada penyusunan renstra 2025-2029 dan renja 2026
2	Indikator Kinerja Utama (IKU) selaras dengan sarana yang akan dicapai dan sustainable dalam satu periode perencanaan strategis	Sudah ditidanklanjuti dengan memastikan IKU selaras dengan sarana yang akan dicapai dalamsatu periode, yaitu pada penyusunan renstra 2025-2029
3	Pembuatan cascading selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra, PK, SKP, Renja) mulai dari sasaran, indikator,	Sudah ditindaklanjuti pembuatan cascading namun masih berproses

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	target, program, dan kegiatan yang mendukung sasaran	
4.	Meningkatkan pemantauan rencana aksi secara berkala agar dapat optimal dalam memenuhi pencapaian seluruh IKU	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring triwulan
5.	Mendokumentasikan proses penyempurnaan dokumen perencanaan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat penyempurnaan dokumentasi
6.	Melengkapi dokumentasi atas setiap proses perbaikan perencanaan agar perbaikan yang dilakukan dapat dinilai dampaknya terhadap hasil kinerja	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat penyempurnaan dokumentasi
7.	Menyusun laporan kinerja yang memuat perbandingan capaian kinerja dengan kinerja/standar provinsi/nasional	Akan dilaksanakan tahun depan (2026), untuk Lkjp Tahun 2025
8.	Menambahkan analisis kualitas capaian kinerja dengan kategori kualitatif (sangat baik, baik, cukup, kurang) dalam dokumen laporan kinerja	Akan dilaksanakan tahun depan (2026) untuk Lkjp Tahun 2025
9.	Melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan membandingkannya dengan efisiensi tahun-tahun sebelumnya untuk melihat kecenderungan perbaikan	Akan dilaksanakan tahun depan (2026) untuk Lkjp Tahun 2025
10.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendorong perolehan nilai SAKIP yang lebih optimal	Sudah ditindaklanjuti dengan Melakukan evaluasi internal
11.	Menyusun dan mengarsipkan dokumen secara sistematis atas pemanfaatan hasil evaluasi untuk mendukung perbaikan kinerja	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat sistem arsip digital dan fisik yang memuat tindak lanjut hasil evaluasi, termasuk bukti implementasi perbaikan
12.	Menyediakan bukti dokumentasi yang menunjukkan bagaimana hasil evaluasi digunakan dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat sistem arsip digital dan fisik yang memuat tindak lanjut hasil evaluasi termasuk bukti implementasi perbaikan
13.	Memperkuat pencatatan atas perbaikan yang dilakukan sebagai hasil dari evaluasi, serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi	Sudah ditindaklanjuti dengan memperkuat pencatatan atas perbaikan evaluasi

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	TW	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,89	I	0	0	
				II	0	0	
				III	0	4,89	
				IV	4,89	6,84	139,87
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari <i>Business as Usual (BaU)</i>	juta Ton CO2eq	1,65	I	0	0	
				II	0	0	
				III	0	0	
				IV	1,65	1,54	93,33
Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,50	I	0	0	
				II	0	0	
				III	0	0	
				IV	85,50	88,01	102,94
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77,00	I	0	0	
				II	0	0	
				III	0	0	
				IV	77,00	0	0

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan

- a. Peningkatan Produksi Hasil Hutan (Produksi Kayu maupun Non Kayu) mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi awal didorong oleh :
 - Optimalisasi pemanfaatan izin usaha pemanfaatan hutan
 - Peningkatan Produktifitas hasil hutan tanaman industri

- Meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas kehutanan seperti kayu olahan, rotan dan hasil hutan bukan kayu lainnya
- b. Membaiknya harga komoditi kehutanan
 Harga komoditas kehutanan di pasar domestik maupun internasional mengalami kenaikan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan juga meningkat sehingga berdampak :
 - Kontribusi terhadap PDRB meningkat walaupun volume produksi tidak naik secara signifikan
 - Peningkatan nilai ekspor produk kehutanan
- c. Dukungan kebijakan dan regulasi.
 Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung sektor kehutanan, antara lain :
 - Kemudahan terhadap perizinan berusaha
 - Program perhutanan sosial yang meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat
 - Insentif bagi pelaku usaha kehutanan

2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

- a. Gambaran umum tentang capaian kinerja serta capaian terhadap capaian nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - Target Indikator Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,65 juta ton CO₂e, namun realisasi yang dicapai sebesar 1,54 juta ton CO₂e. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai sekitar 93,3% dari target, sehingga target Indikator Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari BAU dinyatakan belum sepenuhnya tercapai.
 - Ketidaktercapaian tersebut menunjukkan adanya selisih sekitar 0,11 juta ton CO₂e, yang mengindikasikan bahwa upaya penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon dari sektor kehutanan belum optimal sesuai perencanaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan teknis yang terjadi selama periode pelaksanaan.
 - Salah satu faktor utama adalah masih terjadinya deforestasi dan degradasi hutan pada beberapa wilayah, baik akibat perubahan penggunaan lahan,

perambahan, maupun kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya emisi karbon serta menurunnya kapasitas serapan karbon pada hutan, sehingga mengurangi kontribusi Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU.

- Selain itu, realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta restorasi ekosistem belum sepenuhnya memberikan dampak serapan karbon sesuai target tahunan. Keterbatasan waktu tanam, keberhasilan tumbuh tanaman, serta jeda waktu antara penanaman dan fungsi optimal sebagai penyerap karbon menyebabkan kontribusi serapan karbon belum maksimal pada tahun berjalan.
- Faktor lainnya adalah kondisi kebakaran hutan dan lahan serta , yang pada beberapa lokasi meningkatkan emisi GRK dan menurunkan efektivitas pengendalian emisi. Meskipun upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan, dampak kejadian tersebut tetap memengaruhi capaian akhir Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU.
- Dari aspek tata kelola, tantangan dalam sinkronisasi perencanaan, pendanaan, dan implementasi lintas sektor juga berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian target.
- Secara umum, selisih antara target dan realisasi Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU mencerminkan perlunya penguatan strategi pengendalian deforestasi, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan kualitas pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Upaya perbaikan tersebut menjadi penting agar capaian Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU pada periode berikutnya dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan tahun 2025

b. Analisa terhadap capaian kinerja

- Melakukan analisis capaian kinerja terkait persentase penurunan emisi GRK sub sektor kehutanan dan penggunaan lahan dari BAU menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Penurunan Emisi (\%)} = \frac{\text{Baseline} - \text{Emisi Deforestasi \& Degradasi}}{\text{Baseline}} \times 100\%$$

- Nilai baseline emisi GRK sektor kehutanan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,82 juta ton CO₂e, yang dihitung berdasarkan rata-rata emisi selama 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.
 - Emisi deforestasi dan degradasi dihitung menggunakan data tutupan lahan dengan menganalisis perubahan tutupan lahan dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, khususnya perubahan dari tutupan berhutan menjadi tutupan nonhutan akibat aktivitas manusia.
- c. Faktor Pendorong sampai dengan tahun 2025
- **Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan**
Faktor utama pendorong penurunan emisi GRK adalah penguatan pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan kawasan hutan, penertiban pemanfaatan kawasan hutan, serta pembatasan perubahan fungsi kawasan hutan. Langkah tersebut berkontribusi langsung dalam menekan emisi dari kehilangan tutupan hutan dan menjaga cadangan karbon hutan alam. (Bidang PPH dan Bidang Perlindungan dan KSDAE).
 - **Rehabilitasi Hutan dan Lahan**
Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), baik pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, maupun lahan kritis, turut mendorong peningkatan serapan karbon. Meskipun dampak serapan karbon bersifat jangka menengah hingga panjang, kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi penurunan emisi GRK secara berkelanjutan. (Bidang PDAS dan RHL).
 - **Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**
Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor krusial dalam menekan lonjakan emisi GRK. Penguatan kesiapsiagaan, patroli terpadu, peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, serta koordinasi lintas sektor terbukti mampu menurunkan luas dan intensitas kebakaran, khususnya pada musim kemarau. (Bidang Perlindungan dan KSDAE).
 - **Pengembangan Perhutanan Sosial**
Implementasi program Perhutanan Sosial mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih lestari. Peningkatan akses legal masyarakat

terhadap kawasan hutan mengurangi praktik perambahan dan pembukaan lahan tidak terkendali, sehingga berdampak positif terhadap pengendalian emisi GRK. (Bidang PPMH).

- Penerapan Multi Usaha Kehutanan pada PBPH

Pengembangan Multi Usaha Kehutanan mendorong diversifikasi pemanfaatan hutan tanpa mengurangi tutupan hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pendekatan ini menekan tekanan terhadap pembukaan hutan baru dan mendukung penurunan emisi GRK secara tidak langsung. (Bidang PPH)

3. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Analisa terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

a.1 Capaian IKM melampaui target artinya standar pelayanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan baik, proses pelayanan transparan dan mudah, adanya perbaikan berkelanjutan dalam prosedur pelayanan.

a.2 Implementasi standar pelayanan optimal artinya penerapan standar pelayanan sesuai ketentuan (SOP) berjalan konsisten, kepastian waktu, biaya dan persyaratan semakin jelas bagi masyarakat.

a.3 Kompetensi dan sikap SDM pelayanan artinya petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai, sikap ramah, responsif dan profesional meningkatkan persepsi positif kepada masyarakat.

a.4 Efektifitas penanganan pengaduan artinya mekanisme pengaduan berjalan dengan baik dan responsif, keluhan masyarakat segera ditindaklanjuti, adanya *feedback* yang meningkatkan kepercayaan publik.

b. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Perangkat Daerah. Faktor pendorong tercapainya target dari nilai AKIP di Tahun 2025 adalah

b.1 Komitmen pimpinan yang kuat, sehingga dapat berperan aktif dalam mendorong implementasi nilai SAKIP melalui :

- Penetapan kebijakan berbasis kinerja
- Penguatan budaya kerja berorientasi hasil
- Monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja

b.2 Perencanaan kinerja yang berkualitas seperti renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja disusun dengan baik :

- Selaras antara tujuan, sasaran, indikator dan Program/Kegiatan
- Indikator kinerja telah memenuhi prinsip *SMART (Specific, Mearsurabble, Achievable, Relevant, Time-bound)*
- Adanya cascading kinerja hingga level individu

b.3 Pengukuran kinerja yang efektif

- Tersedianya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur
- Sistem pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan konsisten
- Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP atau sistem sejenis dalam pengumpulan data

b.4 Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kinerja
- Anggaran dialokasikan berbasis kinerja
- Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran meningkat

b.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Adanya pelatihan/bimtek terkait SAKIP, Perencanaan, dan Pengukuran Kinerja
- Pemahaman aparatur terhadap konsep manajemen kinerja semakin baik
- Koordinasi antar unit kerja berjalan efektif

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel III-4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	$5=4/3*100$
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,9	6,84	139,59
2.	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta Ton CO ₂ e	1,65	1,54	93,33
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,50	88,01	3,42
	Nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77,00	-	-

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025, 2024 dan 2023 :

Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	$5=4/3*100$
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	0,272	6,92	6,84	(Tahun 2023 – 2024 : 96,07 %) (Tahun 2024-2025 : -1,15 %)
Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta Ton CO ₂ e	-	3,42	1,54	(- 54,97)
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	84	85	88,01	(Tahun 2023 – 2024 : 1,17 %) (Tahun 2024-2025 : 3,42 %)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	74,5	76,40	-	2,55 %

Analisa

1. Terhadap realisasi indicator meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan dari Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025:

- Analisa terhadap capaian realisasi meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan dari tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan sebesar 101,78 % dikarenakan :
 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan baseline capaian tahun sebelumnya sebagai acuan.
 - Target disusun lebih adaptif terhadap tren pertumbuhan sektor kehutanan
 - Adanya peningkatan kepercayaan terhadap potensi sektor kehutanan sebagai penggerak ekonomi daerah
 - Perbaikan tata kelola hutan produksi yang lebih baik
 - Implementasi program strategis seperti perhutanan sosial
 - Permintaan domestik dan ekspor terhadap produk kehutanan cenderung meningkat.
- Analisa terhadap capaian realisasi meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan dari tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan 1,15 % dikarenakan :
 - Terjadi penurunan volume produksi hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) akibat berkurangnya intensitas pemanenan dan Pembatasan produksi dalam rangka menjaga kelestarian hutan
 - Fluktuasi industri pengolahan artinya Penurunan kapasitas produksi industri pengolahan kayu dan Berkurangnya permintaan pasar terhadap produk olahan kehutanan seperti plywood, veneer, dan furniture
 - Gangguan distribusi dan rantai pasok karena Kendala logistik dan distribusi hasil hutan, Keterbatasan akses atau peningkatan biaya transportasi yang mempengaruhi kelancaran pemasaran.

2. Terhadap realisasi indikator penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU), dari Tahun 2024 dan Tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh :
- Terjadi penurunan capaian Tahun 2024 adalah 3,42 juta ton CO₂e dan capaian Tahun 2025 adalah 1,54 juta ton CO₂e artinya terdapat penurunan kinerja sebesar 54,97 % yang menunjukkan bahwa upaya penurunan emisi pada tahun 2025 tidak seoptimal tahun sebelumnya.
 - Penurunan capaian ini mengindikasikan Efektifitas mitigasi emisi (rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan, dll) mengalami penurunan.
 - Laju pengurangan emisi tidak mampu mengimbangi sumber emisi baru yang muncul
 - Meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan, baik legal maupun ilegal
 - Alih fungsi lahan untuk kegiatan non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan
 - Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan belum memberikan dampak signifikan pada tahun berjalan
 - Adanya *lag time* (waktu tumbuh vegetasi) menyebabkan penyerapan karbon belum optimal
 - Tingkat keberhasilan tanaman (*survival rate*) belum maksimal.
 - Kondisi cuaca ekstrem mempengaruhi pertumbuhan vegetasi dalam menyerap karbon.
3. Terhadap realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh :
- a. Konsistensi Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Adanya perbaikan berkelanjutan pada standar dan prosedur pelayanan
 - Waktu pelayanan semakin cepat dan proses semakin sederhana
 - Layanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- b. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan
- SOP pelayanan diterapkan secara konsisten di seluruh unit layanan

- Maklumat pelayanan dijalankan dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
- c. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM.
 - Petugas pelayanan lebih terlatih dan kompeten
 - Sikap ramah, komunikatif, dan solutif meningkatkan kepuasan pengguna layanan
 - Adanya pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala
 - Lingkungan pelayanan yang tertib dan mudah diakses
- d. Dukungan Kepemimpinan dan Budaya Kerja.
 - Komitmen pimpinan dalam mendorong pelayanan prima
 - Budaya kerja berorientasi pada kepuasan masyarakat semakin kuat.
 - Pengawasan internal dan evaluasi kinerja dilakukan secara konsisten
 - Pemanfaatan Hasil Survei sebagai Bahan Perbaikan
- 4. Terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Penguatan implementasi SAKIP
 - Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin optimal
 - Terjadi perbaikan pada seluruh komponen SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja
 - b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja.
 - Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) semakin berkualitas dan selaras
 - Indikator kinerja dirumuskan lebih tepat, terukur, dan berorientasi outcome
 - c. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran.
 - Program dan kegiatan lebih fokus pada pencapaian sasaran strategis
 - Penganggaran berbasis kinerja (money follows program) semakin efektif
 - d. Penguatan Monitoring dan Evaluasi.
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala

- Tindak lanjut atas hasil evaluasi berjalan konsisten dan berkelanjutan
- e. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja (LKjIP)
- Penyajian laporan kinerja semakin informatif, berbasis data, dan analitis
 - Keterkaitan antara input, output, dan outcome semakin jelas.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel III-6. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RENSTRA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun **2024-2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RENSTRA (Tahun 2024)	% Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	$5=3/4*100$
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	6,84	4,9	139,59
penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta Ton CO ₂ eq	1,54	1,65	93,33
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	88,01	85,5	102,94
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	76,4	76	100,53

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

4.1 Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan** dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah) dapat diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan PDRB Sub Sektor Kehutanan, diantaranya adalah:

a. Gambaran Umum tentang capaian kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tujuan Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub sektor Kehutanan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutanan dan sasaran meningkatnya PDRB Sub sektor Kehutanan.

Capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor kehutanan selama periode tahun 2023–2025 menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2023, LPE sektor kehutanan tercatat sebesar 3,45 persen, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 0,72 persen, dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2025 menjadi 0,63 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor kehutanan masih tumbuh positif, namun laju pertumbuhannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2024 dan 2025 terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi produksi hasil hutan.

Meskipun demikian, capaian pertumbuhan yang masih berada pada zona positif menunjukkan bahwa sektor kehutanan tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan pemanfaatan hutan, percepatan proses

administrasi perencanaan kegiatan produksi, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara lestari guna mendukung peningkatan kinerja pertumbuhan sektor kehutanan secara berkelanjutan

b. Analisis Capaian Kinerja

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor kehutanan merupakan indikator yang menggambarkan pertumbuhan nilai tambah sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Capaian indikator ini dipengaruhi oleh dinamika produksi hasil hutan, tingkat efisiensi usaha pemanfaatan hutan, serta kondisi pasar dan kebijakan pengelolaan hutan

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor kehutanan pada tahun berjalan ditetapkan sebesar 0,84, sedangkan realisasinya tercatat sebesar 0,63. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator tersebut mencapai sekitar 75,00 persen dari target yang ditetapkan.

Belum tercapainya target LPE sektor kehutanan terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya sumber data yang dilakukan dalam perhitungan, pada saat ini perhitungan hanya bersumber dari realisasi produksi hasil hutan kayu dan belum dari produksi hasil hutan yang lainnya. Belum tercapainya target LPE sektor kehutanan juga dikarenakan penurunan produksi hasil hutan kayu pada periode berjalan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan adanya penurunan realisasi produksi hasil hutan kayu yang didapat dari hutan tanaman. Meskipun demikian, pertumbuhan positif sebesar 0,63 menunjukkan bahwa sektor kehutanan tetap memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan percepatan optimalisasi terhadap sumber data selain produksi hasil hutan kayu., serta peningkatan

dalam optimalisasi pelaksanaan multi usaha kehutanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hutan guna mendorong perbaikan kinerja pertumbuhan sektor kehutanan secara berkelanjutan.

Perhitungan Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutanan mencapai 0,63 % angka ini diperoleh dari perhitungan Nilai PDRB Tahun sekarang (2025) dikurangi Nilai PDRB sub sektor kehutanan tahun sebelumnya (2024) dibagi dengan nilai PDRB tahun kehutanan sebelumnya (2024) dikali 100 sehingga diperolehlah angka capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutanan.

Rumus Perhitungan LPE :

$$= \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

1. $PDRB_t$: Nilai PDRB Tahun Sekarang (harga konstan)
2. $PDRB_{t-1}$: Nilai PDRB Tahun Sebelumnya (harga konstan)

Realisasi PDRB Tahun 2025	:	8.582.513.291.000
Realisasi PDRB Tahun 2024 <i>berdasarkan BPS (Kaltim Dalam Angka 2024)</i>	:	8.528.409.975.778

$$\begin{aligned}
 \text{LPE sektor Kehutanan} &= \frac{(8.582.513.291.000 - 8.528.409.975.778)}{8.528.409.975.778,10} \\
 &= \frac{54.103.315.221,90}{8.528.409.975.778} \\
 &= \mathbf{0,63\%}
 \end{aligned}$$

c. Faktor Pendorong

1. Tersedianya persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) memberikan kepastian hukum bagi pemegang perizinan berusaha untuk melaksanakan kegiatan pemanenan dan pengangkutan hasil hutan kayu secara legal dan terukur
2. Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH) sehingga data realisasi produksi Hasil Hutan setiap unit manajemen dapat terpantau melalui system pelaporan.

d. Faktor Penghambat

1. Rendahnya realisasi dalam perhitungan dikarenakan hanya memuat realisasi produksi dari hasil hutan kayu dan belum memuat dari realisasi produksi lainnya.
2. Penurunan realisasi produksi hasil hutan kayu mengakibatkan terbatasnya nilai tambah pada sektor kehutanan, khususnya pada realisasi produksi dari hutan tanaman hal ini disebabkan :
 - Ada beberapa petak tanam yg potensi rendah (low potensi) karena pertumbuhan rendah dan terserang hama penyakit.
 - Adanya penundaan panen dikarenakan adanya kenaikan biaya operasional/logistic dan peralatan alat berat dalam kondisi rusak
 - Permintaan bahan baku kayu dari pabrik-pabrik atau industri olahan lainnya yang mengalami penurunan/bervariasi sesuai kondisi pasar global.
 - Proses pengiriman kayu ke industri terhambat karena perizinan terminal khusus yg lama dan menghambat pengiriman kayu dari tptk hutan ke logpond sehingga kegiatan tebang juga terhambat.
 - Curah hujan yang tinggi sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penebangan dan pengangkutan kayu
3. Terjadinya perubahan kewenangan terhadap areal perizinan di Kalimantan Timur dengan wilayah IKN yang berdampak pada penurunan produksi.

e. Upaya kedepannya

1. Menambah sumber data realisasi produksi di luar realisasi produksi hasil hutan kayu :

- Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu
 - Realisasi dari perijinan Perhutanan Sosial
2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan multi usaha kehutanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hutan.
 3. Mendorong optimalisasi hilirisasi produk hasil hutan.
 4. Melakukan pembinaan ke PBPH terhadap capaian kinerja yang direncanakan dan dilaksanakan guna untuk mengetahui capaian dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan
 5. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM PBPH

4.2 Dari data capaian kinerja sasaran **Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan** dengan indikator penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari *Business As Usual (BAU)* (juta ton CO₂e), Untuk target penurunan emisi pada tahun 2025 adalah 1,65 juta ton Dinas Kehutanan CO₂e dimana realisasi capaian sebesar 1,54 juta ton CO₂e, sehingga target tidak tercapai dikarenakan :

a. Gambaran Umum

Target Indikator Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,65 juta ton CO₂e, namun realisasi yang dicapai sebesar 1,54 juta ton CO₂e. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai sekitar 93,3% dari target, sehingga target Indikator Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari BAU dinyatakan belum sepenuhnya tercapai.

Ketidaktercapaian tersebut menunjukkan adanya selisih sekitar 0,11 juta ton CO₂e, yang mengindikasikan bahwa upaya penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon dari sektor kehutanan belum optimal sesuai perencanaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan teknis yang terjadi selama periode pelaksanaan.

Salah satu faktor utama adalah masih terjadinya deforestasi dan degradasi hutan pada beberapa wilayah, baik akibat perubahan penggunaan lahan, perambahan, maupun kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya emisi karbon serta menurunnya kapasitas serapan karbon pada hutan, sehingga mengurangi kontribusi Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU.

Selain itu, realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta restorasi ekosistem belum sepenuhnya memberikan dampak serapan karbon sesuai target tahunan. Keterbatasan waktu tanam, keberhasilan tumbuh tanaman, serta jeda waktu antara penanaman dan fungsi optimal sebagai penyerap karbon menyebabkan kontribusi serapan karbon belum maksimal pada tahun berjalan.

Faktor lainnya adalah kondisi kebakaran hutan dan lahan serta , yang pada beberapa lokasi meningkatkan emisi GRK dan menurunkan efektivitas pengendalian emisi. Meskipun upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan, dampak kejadian tersebut tetap memengaruhi capaian akhir Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU.

Dari aspek tata kelola, tantangan dalam sinkronisasi perencanaan, pendanaan, dan implementasi lintas sektor juga berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian target.

Secara umum, selisih antara target dan realisasi Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU mencerminkan perlunya penguatan

strategi pengendalian deforestasi, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan kualitas pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Upaya perbaikan tersebut menjadi penting agar capaian Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan dari BAU pada periode berikutnya dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan

b. Analisis Capaian Kinerja

Melakukan analisis capaian kinerja terkait persentase penurunan emisi GRK sub sektor kehutanan dan penggunaan lahan dari BAU menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penurunan Emisi (\%)} = \frac{\text{Baseline} - \text{Emisi Deforestasi \& Degradasi}}{\text{Baseline}} \times 100\%$$

Nilai baseline emisi GRK sektor kehutanan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,82 juta ton CO₂e, yang dihitung berdasarkan rata-rata emisi selama 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.

Emisi deforestasi dan degradasi dihitung menggunakan data tutupan lahan dengan menganalisis perubahan tutupan lahan dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, khususnya perubahan dari tutupan berhutan menjadi tutupan nonhutan akibat aktivitas manusia

c. Faktor Pendorong

- Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan

Faktor utama pendorong penurunan emisi GRK adalah penguatan pengendalian deforestasi dan degradasi hutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan kawasan hutan, penertiban pemanfaatan kawasan hutan, serta pembatasan perubahan fungsi kawasan hutan. Langkah tersebut berkontribusi langsung dalam menekan emisi dari kehilangan tutupan hutan dan menjaga

cadangan karbon hutan alam. (Bidang PPH dan Bidang Perlindungan dan KSDAE).

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), baik pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, maupun lahan kritis, turut mendorong peningkatan serapan karbon. Meskipun dampak serapan karbon bersifat jangka menengah hingga panjang, kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi penurunan emisi GRK secara berkelanjutan. (Bidang PDAS dan RHL).

- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor krusial dalam menekan lonjakan emisi GRK. Penguatan kesiapsiagaan, patroli terpadu, peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, serta koordinasi lintas sektor terbukti mampu menurunkan luas dan intensitas kebakaran, khususnya pada musim kemarau. (Bidang Perlindungan dan KSDAE).

- Pengembangan Perhutanan Sosial

Implementasi program Perhutanan Sosial mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih lestari. Peningkatan akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan mengurangi praktik perambahan dan pembukaan lahan tidak terkendali, sehingga berdampak positif terhadap pengendalian emisi GRK. (Bidang PPMH).

- Penerapan Multi Usaha Kehutanan pada PBPH

Pengembangan Multi Usaha Kehutanan mendorong diversifikasi pemanfaatan hutan tanpa mengurangi tutupan hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pendekatan ini menekan tekanan terhadap pembukaan hutan baru

dan mendukung penurunan emisi GRK secara tidak langsung.
(Bidang PPH)

d. Faktor Penghambat

- Tekanan Perubahan Penggunaan Lahan

Masih tingginya tekanan terhadap kawasan hutan akibat perubahan penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan, perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur menjadi salah satu hambatan utama. Aktivitas ini berpotensi meningkatkan emisi GRK melalui deforestasi dan degradasi hutan, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas tinggi.

- Deforestasi dan Degradasi Hutan yang Masih Terjadi

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengendalian, deforestasi dan degradasi hutan belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, serta pembukaan lahan tidak terkendali masih terjadi di beberapa lokasi, sehingga mengurangi cadangan karbon dan meningkatkan emisi GRK.

- Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau dan saat terjadi anomali iklim, menjadi faktor signifikan yang menghambat penurunan emisi GRK. Kebakaran tidak hanya menghasilkan emisi dalam jumlah besar, tetapi juga menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon pada periode berikutnya.

- Keterbatasan Dampak Jangka Pendek Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) memerlukan waktu yang cukup panjang sebelum memberikan kontribusi serapan karbon yang optimal. Pada tahun berjalan, dampak serapan karbon dari kegiatan RHL belum sepenuhnya dapat diakui, sehingga pengaruhnya terhadap penurunan emisi GRK relatif terbatas dalam jangka pendek.

- Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kehutanan berkelanjutan turut memengaruhi capaian penurunan emisi GRK. Kondisi ini berdampak pada skala dan intensitas program yang dapat dilaksanakan secara optimal.

- Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap pembukaan lahan sebagai sumber penghidupan masih menjadi tantangan dalam pengendalian emisi GRK. Tanpa alternatif ekonomi yang berkelanjutan, tekanan terhadap kawasan hutan berpotensi terus berlanjut.

e. **Upaya Perbaikan**

- Penguatan Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan

Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan intensitas pengawasan kawasan hutan, khususnya pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap deforestasi dan degradasi. Pendekatan berbasis spasial dan risiko akan diperkuat untuk memastikan intervensi lebih tepat sasaran, sehingga potensi emisi dari kehilangan tutupan hutan dapat ditekan secara signifikan.

- Percepatan dan Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Perbaikan kinerja dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), termasuk pemilihan jenis tanaman bernilai karbon tinggi dan peningkatan tingkat keberhasilan tumbuh. Selain itu, penguatan pemeliharaan pascatanam menjadi fokus utama agar kontribusi serapan karbon dapat meningkat secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

- **Optimalisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**
Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan diperkuat melalui peningkatan kesiapsiagaan dini, patroli terpadu, serta penguatan peran Masyarakat Peduli Api. Integrasi sistem peringatan dini dan respons cepat diharapkan mampu menekan kejadian kebakaran dan lonjakan emisi GRK, terutama pada musim kemarau ekstrem.
- **Penguatan Implementasi Perhutanan Sosial dan Multi Usaha Kehutanan**
Perbaikan dilakukan dengan mendorong pemanfaatan kawasan perhutanan sosial secara produktif dan berkelanjutan. Pengembangan Multi Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan akan diperluas untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru dan menekan tekanan terhadap kawasan hutan.
- **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Pendanaan**
Upaya perbaikan selanjutnya diarahkan pada peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Optimalisasi sumber pendanaan, termasuk dukungan pembiayaan berbasis kinerja dan kerja sama multipihak, menjadi kunci untuk meningkatkan skala dan dampak program penurunan emisi GRK.
- **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan**
Penguatan kapasitas aparatur kehutanan melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi pengelolaan karbon, serta pemanfaatan teknologi informasi akan mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Kelembagaan pengelolaan penurunan emisi GRK juga

perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan

4.3 Peningkatan Penunjang Unsur Pemerintah Daerah, terdapat dua indikator yaitu :

- a. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan target 85,00 Indeks dan capaiannya 88,01.

- **Gambaran Umum**

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Penilaian IKM dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap berbagai unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi petugas, perilaku petugas, serta sarana dan prasarana.

Pada tahun berjalan, target IKM yang ditetapkan sebesar 85,00 (kategori Baik), sementara realisasi yang dicapai sebesar 88,01, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah berada pada kategori baik menuju sangat baik, serta mampu memenuhi bahkan melebihi harapan masyarakat.

Tingginya capaian IKM tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi informasi, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, responsivitas terhadap pengaduan serta komitmen pimpinan dalam mendorong

pelayanan prima turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan capaian ini, diharapkan perangkat daerah dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten, serta menjadikan hasil survei IKM sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan inovasi pelayanan publik ke depan.

- Analisis Capaian Kinerja

Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah berjalan secara efektif dan mampu memenuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu layanan, serta kejelasan informasi terkait persyaratan dan biaya pelayanan.

Selain itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap persepsi positif masyarakat. Sikap petugas yang ramah, responsif, dan solutif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan juga memberikan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi dalam proses pelayanan.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang semakin responsif juga menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan nilai IKM. Hasil survei kepuasan masyarakat yang secara konsisten dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.

Dengan capaian yang melampaui target tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah berada pada kategori baik menuju sangat baik. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini melalui inovasi pelayanan, penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan, serta peningkatan kualitas SDM dan sistem pendukung pelayanan

- Faktor Pendorong

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah pada tahun berjalan sebesar 88,01, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,00. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Pelayanan yang Konsisten

Pelaksanaan standar pelayanan (SOP dan maklumat pelayanan) berjalan secara konsisten, sehingga memberikan kepastian terhadap waktu, biaya, dan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM

Aparatur pelayanan memiliki kompetensi yang memadai serta menunjukkan sikap yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan pelayanan, sehingga meningkatkan persepsi positif masyarakat.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi layanan melalui sistem online dan aplikasi pelayanan mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

4. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Tersedianya fasilitas pelayanan yang nyaman, tertib, dan mudah diakses turut mendukung peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat.

5. Efektivitas Penanganan Pengaduan

Mekanisme pengaduan masyarakat berjalan dengan baik, di mana setiap keluhan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat daerah.

- Upaya Perbaikan ke depannya

1. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk penguatan layanan digital untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas pelayanan.

2. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi aparatur pelayanan guna meningkatkan kompetensi teknis, etika pelayanan, serta integritas dalam memberikan pelayanan publik

3. Meningkatkan integrasi sistem layanan berbasis elektronik (e-service) agar proses pelayanan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
 4. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan agar tetap nyaman, inklusif, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan
 5. Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tuntas sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan
- b. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target 77,00 Nilai AKIP.
- a. Penguatan implementasi SAKIP
 - Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin optimal
 - Terjadi perbaikan pada seluruh komponen SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja
 - b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja.
 - Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) semakin berkualitas dan selaras
 - Indikator kinerja dirumuskan lebih tepat, terukur, dan berorientasi outcome
 - c. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran.
 - Program dan kegiatan lebih fokus pada pencapaian sasaran strategis
 - Penganggaran berbasis kinerja (money follows program) semakin efektif
 - d. Penguatan Monitoring dan Evaluasi.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala
 - Tindak lanjut atas hasil evaluasi berjalan konsisten dan berkelanjutan
- e. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja (LKjIP)
- Penyajian laporan kinerja semakin informatif, berbasis data, dan analitis
 - Keterkaitan antara input, output, dan outcome semakin jelas

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan analisa realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja dapat disampaikan bahwa penggunaan sumber daya anggaran pada masing-masing indikator menunjukkan tingkat efisien.

Tabel III-7 Analisa Realisasi Anggaran berdasarkan indikator kinerja

No.	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	49.626.517.491	46.495.750.623	93,69
2	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	280.690.685.739	221.187.503.002	78,80
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	1.355.237.431	1.337.818.365	98,71
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	316.497.410.531	213.009.032.875	67,30
	Total	648.169.851.192	482.030.104.865	74,38

Secara umum, analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya pada kedua indikator telah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, di mana realisasi anggaran tetap berada dalam koridor pagu yang ditetapkan. Tingkat penyerapan yang tinggi pada indikator pertama mencerminkan optimalisasi pelaksanaan program, sedangkan pada indikator kedua menunjukkan adanya ruang efisiensi yang perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa penghematan anggaran tidak berdampak

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisa dengan membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase capaian anggaran, tingkat efisiensi diperoleh dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, apabila nilai selisih menunjukan angka positif, maka dapat diartikan bahwa pencapaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran sehingga menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya

Tabel III-8. Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	139,59	93,69	(0,36)
2	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	93,33	78,80	60,79
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	102,94	98,71	4,23
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100,53	67,30	33,23

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur melalui perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Tingkat efisiensi diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Semakin besar nilai positif yang dihasilkan, maka semakin efisien penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan Tabel III-8, pada sasaran strategis Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan, capaian kinerja sebesar 93,33% dengan penyerapan anggaran 93,69%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar (0,36). Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif sebanding dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Pada sasaran Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU), capaian kinerja mencapai 139,59% dengan penyerapan anggaran sebesar 78,80%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 60,79. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dilampaui dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang dialokasikan.

Selanjutnya, pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 102,94% dengan penyerapan anggaran 98,71%, menghasilkan efisiensi sebesar 4,23. Sementara itu, pada sasaran **Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, capaian kinerja sebesar 100,53% dengan penyerapan anggaran 67,30%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 33,23.

Secara umum, hasil perbandingan menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis dapat dicapai dengan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis pada RPJMD adalah dengan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan; Meningkatkan Pengelolaan Hutan Yaitu Persentase tutupan lahan; Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan yaitu Laju Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sub Sektor Kehutanan; meningkatnya urusan penunjang urusan pemerintahan yaitu indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah dan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, selain itu tidak lepas dari dukungan oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) diantaranya sebagaimana tertera dalam penjelasan dibawah ini :

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja adalah, sebagai berikut :

- a. Dukungan pendanaan yang memadai tersedianya sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Reboisasi (DBH SDA DR) yang mendukung program, kegiatan dan Sub Kegiatan.
- b. Program pelaksanaan dan kegiatan yang tepat sasaran, seperti program yang fokus pada peningkatan pengelolaan hutan, rehabilitasi lahan, serta perlindungan kawasan hutan maupun meningkatkan persentase tutupan lahan
- c. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, dengan adanya upaya pengendalian kebakaran hutan, penegakan hukum terhadap aktivitas

ilegal, serta pengelolaan hutan berkelanjutan yang berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan

- d. Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan secara lestari dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan perangkat daerah dalam hal perbaikan sistem manajemen kinerja, pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- f. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemangku kepentingan
- g. Faktor Alam (Cuaca) seperti : curah hujan tinggi, sehingga meningkatkan kelembapan dan mempengaruhi mengurangi tingkat kekeringan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
- h. Pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan, melibatkan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun Masyarakat Mitra Polhut (MPA)

Solusi alternatif Penyelesaian Masalah:

- a. Melakukan perencanaan lebih terukur, efisien dan berbasis prioritas dalam mendukung program dan kegiatan
- b. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebutuhan lapangan, memperkuat dukungan data, serta melakukan evaluasi secara berkala agar kegiatan peningkatan pengelolaan hutan, rehabilitasi lahan dan perlindungan kawasan hutan
- c. Meningkatkan pengawasan, perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dengan melakukan patroli rutin, deteksi dini, penanganan

cepat, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Langkah ini perlu diperkuat karena pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari mandat nasional, dan masyarakat Peduli Api (MPA) secara resmi diposisikan sebagai unsur masyarakat yang membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- d. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Untuk mendorong pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi namun tetap menjaga kelestarian, termasuk pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan usaha kehutanan berbasis masyarakat agar kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah meningkat.
- e. Peningkatan tata kelola perangkat daerah sehingga memperkuat sistem kinerja, pelayanan publik, pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas agar indeks kepuasan masyarakat dan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah meningkat.
- f. Penguatan sinergi lintas pihak, hal ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat agar terlaksananya program kehutanan secara lebih terpadu, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung.
- g. Mitigasi risiko faktor alam/cuaca, ini dilakukan untuk meningkatkan pemantauan kondisi cuaca dan kelembapan, memerlukan sistem peringatan dini kebakaran, serta menyiapkan langkah antisipasi pada musim rawan agar dampak cuaca ekstrem dapat ditekan.
- h. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, memperkuat kapasitas MPA dan Masyarakat Mitra Polhut, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan, dan pelestarian hutan,

rehabilitasi hutan dan lahan juga merupakan instruksi penting dalam pemulihan fungsi hutan dan pengurangan risiko kerusakan lebih lanjut.

Tabel III-8. Capaian Progam dan Kegiatan Tahun 2025

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Dinas Kehutanan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85,5	88,01	100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Presentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	%	1	1,94	6
	Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4.450.000	5.048.525	113,45
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	20	19	95
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407,17	5245653,16	101,79
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	250	250	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25000	5232,5	20,93
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	M3	16499	27716,67	167,99
Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	SK;Sertifika	105	105	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	730007,98	730007,98	100
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Ha	665142	665142	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20477	102,39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	17	20	117,65
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	196336	196336	100
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	100
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	81	81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	89	89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	95	95
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan	Hektar	730007,98	730007,98	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Konservasi Provinsi yang dikelola				
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Hektar	64814	64814	100
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Ha	1	1	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20000	20478	102,39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	2	50
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	63	63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan Kayu	m	4450000	5048525	113,45
	Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	0	0
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	200	110	55

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7497170	247406,61	3,3
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	93,859	93,85	99,99
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	105	105	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	2	2	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	71,43	71,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	0	0
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,153	5,15	99,94
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	50	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,929	0,06	0,76
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	7	5	71,43

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	86,99	104,81
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0	200
	Produksi Hasil Hutan Kayu,	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hsil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	58748,84	1,14
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	50	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25000	110	0,44
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20000	20478	102,39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	6	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,153	5,15	99,94
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	613	613	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	7929179	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	1	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	89,8	108,19
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,153	5,15	99,94
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	50	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	2	2	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	5153407	100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	200	200	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25000	25000	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	5153407	100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	170	170	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	7929179	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	88	106,02
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	50	50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	95,36	95,36
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	1,94	6
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	51534073	32481926,21	63,03
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	175	175	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	6171280,02	77,83
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	223657,86	4,34
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	170	170	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	0	0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	125
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	71,03	85,58
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	89	89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	63,05	63,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	98,46	98,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	99,9	99,9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	94,96	94,96
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	4450000	100
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	900	100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	1	100
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	5091050,78	98,79
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	138	134,29	97,31
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	20000	2	0,01
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20000	100
	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	20	100
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	6	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83,72	100,87
	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	70	70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Persentase Luas Lahan yang diRehabilitasi Terhadap Luas Lahan yang dapat diRehabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	%	1	0,06	194
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	181	186,99	103,31
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	0	200
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	2). Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	6	150
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	79,74	96,07
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	113374,95	2,2

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	385	352,01	91,43
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	0	0
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	M3	4,5	0	0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20478	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	6
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,153	5,15	99,94
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50	50	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,929	7,92	99,89
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	730,007	730,01	100
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Ha	1	1	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20000	20476	97,62
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	45
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	1	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048525	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	5153407	100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	160	160	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25000	40	199,84
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20000	20478	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	5	125
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	900	1658,7	184,3
	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,06	194
	Produksi Hasil Hutan kayu	M3	4450000	5048525	113,45
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	5153407	100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	165	165	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25000	25000	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20000	100
	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	20	20	100
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	5	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	83	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	98,33	98,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	92,47	92,47
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	99	99
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,066	193,4
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048537,23	113,45

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,67	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,153	5,15	99,94
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	177	165	93,22
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7929179	7929179	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20000	20477	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20	31	155
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	91,74	110,53
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	83,6	83,6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	96,96	96,96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	83,9	83,9
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	88,56	88,56
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	81,82	81,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	85,71	85,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,066	193,4
	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4450000	5048537,23	113,45
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900	1658,67	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	5153407	100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	20	20	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7497170	0	0
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Ha	730,007	730,007	100
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	2	2	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	20	31	155
	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20000	20447	102,24
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	2	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	196336	196336	100
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	82	98,8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100	75	75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,71	100
	2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	%	1	0,06	6
	Produksi hasil hutan kayu	m/tahun	4445000	5048631	113,58
	Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	900	1658,7	184,3
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	100
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5153407	4444813,54	86,25
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	25	25	100
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25000	25000	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20000	20477	102,39
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	2	2	100
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	2	66,67

D. Realisasi Anggaran

Tabel III-9. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	realisasi	%	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1. penurunan Emisi Sektor Kehutanan dari Business Usual (BaU) 2. Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Hutan	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi (%)	0,71	0,71	100	233.372.823.537,00	179.787.826.614,17	77,04
		Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan (%)	1	1,94	194			
		Produksi hasil hutan bukan kayu (Ton)	900	1658,7	184,3			
		Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	4450000	5048525	113,45			
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	730007,98	730007,98	100	10.113.512.422,00	9.895.586.264,00	97,85
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok)	20	31	155	79.388.392.639,00	71.200.138.376,13	89,69
		Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	20000	20477	102,385			
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	196336	196336	100	7.442.474.632,00	6.799.702.371,00	91,36
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariaan (Indeks)	83	83	100	317.878.207.962,00	214.372.403.639,28	67,44

		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanj uti (%)	100	100	100			
--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

Tabel III-10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	233.372.823.537	179.787.826.614	77,04
		Presentase Luas kerusakan kawasan hutan			
		Produksi Hasil Hutan Kayu			
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu			
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	49.049.604.731,00	45.510.444.962,87	92,78
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1.990.657.845,00	1.840.029.967,00	92,43
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	3.837.926.443,00	3.471.897.571,00	90,46
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	97.455.556.754,00	92.300.638.459,30	94,71
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	78.706.691.818,00	34.601.722.482,00	43,96
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	623.991.875,00	417.722.423,00	66,94
	Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	1.708.394.071,00	1.645.370.749,00	96,31
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	10.113.512.422,00	9.895.586.264,00	97,85
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	9.040.203.195,00	8.873.988.919,00	98,16
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1.073.309.227,00	1.021.597.345,00	95,18
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	79.388.392.639,00	71.200.138.376,13	89,69
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	79.388.392.639,00	71.200.138.376,13	89,69
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	7.442.474.632,00	6.799.702.371,00	91,36
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	7.442.474.632,00	6.799.702.371,00	91,36
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	317.878.207.962,00	214.372.403.639,28	67,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	1.355.237.431,00	1.337.818.365,00	98,71
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	138.460.958.811,00	134.998.070.164,00	97,50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	513.113.134,00	482.286.303,00	93,99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	1.967.529.136,00	1.838.473.619,00	93,44
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	14.088.541.903,00	13.674.832.285,00	97,06
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	119.641.919.534,00	23.461.637.834,28	19,61
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	26.106.592.021,00	23.961.268.366,00	91,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	15.744.315.992,00	14.618.016.703,00	92,85
Total			648.195.411.192,00	482.055.657.264,58	74,37

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur "**Berhasil**" mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sasaran strategis Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan tercapai 6,84 Triliun Rupiah dengan target 4,9 Triliun Rupiah dengan rasio capaian sebesar 139,59%; sasaran Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dengan indikator Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari *Business as Usual (Bau)* tercapai 1,54 Juta Ton CO₂e dengan target 1,65 Juta Ton CO₂e dengan rasio capaian sebesar 93,33%; dan sasaran peningkatan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat perangkat daerah tercapai 85,5 Indeks dengan target 85,5 Indeks dengan rasio capaian sebesar 102,94 %, dan Indikator Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai nilai 76,4 dengan target nilai 76 dengan rasio capaian sebesar 100,53%
2. Adapun untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sehingga berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tunjang dengan Program dan Kegiatan yang bersumber pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi Kinerja produksi hasil hutan kayu 113,45%; Produksi hasil hutan bukan kayu 184,3%; Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 100%; dan Persentase luas kerusakan kawasan hutan 194,00%), untuk realisasi keuangan 77,04%, dengan Kegiatan :

- 1) Pengelolaan rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (realisasi keuangan 92,78%);
 - 2) Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) (Realisasi keuangan 92,43%);
 - 3) Pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (realisasi keuangan 90,46 %);
 - 4) Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara (realisasi keuangan 94,71 %);
 - 5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (realisasi keuangan 43,96 %);
 - 6) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun (realisasi keuangan 66,94%)
 - 7) Perbenihan tanaman hutan (realisasi keuangan 96,31%)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (realisasi kinerja 100 %) untuk realisasi keuangan 97,85 % dengan kegiatan:
- 1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (realisasi keuangan 98,16%);
 - 2) Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (realisasi keuangan 95,18 %);
- c. Program Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan (realisasi kinerja jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 155 %; dan Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 102,385) untuk realisasi keuangan 83,18 %, dengan kegiatan
- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (realisasi keuangan 83,18 %);

- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (realisasi kinerja Luas DAS dan Sub DAS yang dilekola 100%), untuk realisasi keuangan 91,36 %), dengan kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (realisasi keuangan 91,36 %);
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (realisasi kinerja indeks kualitas layanan kesekretariata 100%; dan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 100%) untuk realisasi keuangan 67,44%, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (realisasi keuangan 98,71 %)
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (realisasi keuangan 97,50 %)
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (realisasi keuangan 93,99 %)
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (realisasi keuangan 93,44 %)
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah (realisasi keuangan 97,06 %)
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (realisasi keuangan 19,61 %)
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi keuangan 91,78 %)
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi keuangan 92,85 %)
3. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan dilapangan, beberapa hal yang menjadi catatan adalah :

- Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Selaian itu proses administrasi dan mekanisme pengadaan barang yang memerlukan tahapan perencanaan, verifikasi, serta persetujuan juga memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga mempengaruhi kecepatan.
- Pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan, kondisi geografis wilayah kerja serta keterbatasan akses menuju lokasi kegiatan yang cukup sulit jangkauannya turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti patroli, pengamanan dan pengawasan hutan
- Pada kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 m³ per tahun, kendala yang dihadapi antara lain dinamika operasional pelaku usaha pengelolaan hasil hutan di lapangan serta keterbatasan data dan informasi terkait unit usaha yang menjadi sarana pelatihan dan pengawasan kondisi tersebut turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

1. Dengan terbentuknya 20 Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, maka diharapkan kepada UPTD KPH untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan hutan secara lestari yang berlandaskan pada aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan terhadap mitra – mitra kerja (IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM, KTH dan Masyarakat sekitar hutan) di dalam wilayah kerja UPTD KPH masing-masing.

3. Mengoptimalkan sarana dan prasara operasional di lapangan, seperti kendaraan operasional, pelatihan patroli, serta dukungan logistik lainnya untuk menunjang kegiatan pengawasan dan perlindungan kawasan hutan
4. Perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi data dari Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola dan didesain dengan baik sehingga menjadi pedoman dan acuan dalam merencanakan kegiatan, mempermudah dalam pengawasan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.

